

Profesionalisme, Demokrasi dan Kualitas DPR Kita

A.M.W. PRANARKA

Problematik yang terkandung di dalam tiga pengertian di atas itu memang merupakan problem aktual, artinya saat ini banyak dipermasalahkan dan didiskusikan. Orang dapat memandang hal ini sebagai problem musiman. Satu dan lain hal dipacu oleh jalannya kalender politik nasional kita. Kita sedang berada pada bagian awal dari siklus pemilihan umum sebagai bagian dari perputarannya kalender demokrasi kita.

Menghadapi tumbuhnya diskusi seperti itu, secara cepat mungkin kita ingin segera sampai kepada suatu jawaban final dengan mengatakan bahwa kualitas DPR di dalam perkembangan demokrasi kita dapat ditingkatkan melalui proses profesionalisasi. Tetapi terhadap kesimpulan seperti itu sekurang-kurangnya akan muncul dua keberatan.

Keberatan pertama akan timbul dari sementara kalangan yang memandang bahwa kualitas DPR di dalam demokrasi Pancasila tidak ditentukan oleh profesionalisme, karena kualitas itu hanya akan tercapai manakala: sistem pemilihan kita diubah, sistem kepartaian kita/organisasi politik kita dirombak, bahkan sistem demokrasi Pancasila itu kita buang. Keberatan kedua akan mempertanyakan: apakah memang ada hubungan antara profesionalisasi, demokrasi dan kualitas DPR? Adakah hubungan interdependen di antara ketiga pengertian tersebut? Apakah arti dari ketiga pengertian itu? Tepatkah kita memakai istilah profesionalisasi politik?

Reaksi pertama adalah reaksi yang asumsinya adalah keinginan dan aspirasi untuk mengadakan perombakan terhadap sistem politik yang ada di Indonesia ini baik secara sebagian maupun secara total. Reaksi kedua sifatnya lebih analitik, mengkaji pengertian-pengertian yang ada (profesionalisme, demokrasi dan kualitas DPR) secara mendasar serta melihat problematik yang

terjalin di dalam inter-relasi ketiga pengertian tersebut. Keberatan klasifikasi pertama dapat dikatakan mempunyai warna politik praktikal (walaupun diungkapkan pula secara teoretikal), keberatan klasifikasi kedua titik beratnya adalah analisis teoretikal (walaupun membawa pula implikasi praktikal di dalamnya).

Batas antara yang praktikal dan yang teoretikal itu memang tidak mudah untuk menentukannya, terutama di dalam pemikiran-pemikiran politik dan kemasyarakatan. Maka itu tidak jarang di dalam membahas masalah politik dan kemasyarakatan beberapa orang merasa perlu mengemukakan terlebih dahulu apa yang menjadi posisi subjektifnya secara jelas, sebagai bagian dari tanggung jawab etis intelektual. Politik adalah hal yang kompleks, dan manusia selalu mungkin membuat manipulasi-manipulasi teoretikal maupun praktikal.

Apabila disposisi subjektif itu perlu dikemukakan terlebih dahulu di dalam pembahasan ini, maka perlu diungkapkan bahwa pandangan yang selanjutnya akan diuraikan di dalam naskah ini memang tergolong kepada pandangan yang tidak dapat begitu saja menyetujui kesimpulan bahwa kualitas DPR di dalam pembangunan demokrasi Pancasila perlu ditingkatkan melalui profesionalisasi. Namun dari lain pihak ketidaksepakatan tersebut tidaklah didasarkan atas kehendak dan keinginan untuk merombak sistem politik nasional kita yaitu demokrasi Pancasila, seperti misalnya merombak Golkar, merombak sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, merombak dwifungsi, apalagi merombak Pancasila dan UUD 1945. Dengan perkataan lain pandangan ini menginginkan adanya sikap *analitik kritis* terhadap posisi maupun proporsi politik mengenai profesionalisme dan demokrasi, yang didasari oleh suatu sikap *realisme kultural*. Realisme, artinya berpijak pada kenyataan yang ada. Kultural, yaitu dengan melihat bahwa masalahnya secara mendasar adalah masalah manusia, masalah perkembangan kebudayaan.

PENDEKATAN KULTURAL

Politik, termasuk di dalamnya profesionalisasi dan demokrasi, adalah bagian dari perkembangan kebudayaan manusia. Profesionalisasi dan demokrasi bukanlah pengertian-pengertian yang statik, mati, berhenti. Keduanya adalah pengertian-pengertian dinamik, evolutif, bergerak, berubah. Sebagai bagian dari kebudayaan keduanya juga mencerminkan sifat dasar kebudayaan.

Kebudayaan inti pusatnya adalah manusia. Kebudayaan merupakan seluruh proses maupun produk usaha budidaya manusia secara terus-menerus di

dunia dan di dalam sejarah. Usaha tersebut adalah usaha dalam kebersamaan dan dalam kesinambungan. Menurut Ki Hadjar Dewantara kebudayaan itu akan selalu dilibatkan dan dihadapkan kepada perputarannya alam dan zaman sebagai tantangan dan akan berjalan melalui dalil *kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas*.

Kebudayaan adalah ungkapan dari kodrat dasar manusia, dan karenanya juga mencerminkan sifat dasar manusia. Manusia mempunyai historisitas (berada di dalam sejarah, tumbuh berkembang di dalam sejarah), sosialitas (berada di dalam kebersamaan), mengandung di dalamnya kodrat dasar kemanusiaan yang universal (het algemeen menselijke) akan tetapi juga kepribadian yang bersifat khusus (identitas), mengandung di dalamnya "ke-apaan" dan "ke-siapaan." Manusia memiliki dinamika akan tetapi juga keterbatasan, ada daya yang mampu mengatasi keterbatasan, yaitu dengan transendental (dan karena itu ada keterbukaan potensial di dalam hubungan dengan Tuhan, Yang Maha Mutlak), namun selalu tumbuh di dalam berbagai batasan sebagai konteks aktualnya. Manusia itu tumbuh dalam daya batin dan daya lahir, dan menghasilkan kebudayaan lahir maupun kebudayaan batin. Manusia tumbuh di dalam konteks hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan hubungan horisontal (dengan sesama manusia dan alam semesta). Ini semua merupakan sifat dasar hidup dan kehidupan manusia, yang oleh sementara tradisi Jawa disebut sebagai "*dai kang tan sawala*," artinya: manusia sekedar menerima, tidak dapat mengubah situasi dasar kodratinya.

Satu hal lagi yang perlu dikemukakan adalah bahwa manusia juga selalu berada di dalam tegangan yang terus-menerus antara kecenderungan kepada kebaikan di satu pihak dan kecenderungan kepada yang tidak baik (aspek moral dari kebudayaan). Memilih kepada jalur kebaikan itulah yang dapat dipandang sebagai jalan kebudayaan. Maka kebudayaan itu selalu mempunyai sifat memajukan, menyatukan tidak memecah, memperkuat kebersamaan, mengatasi kesukaran, memecahkan permasalahan, membangun, meningkatkan, mencari keselarasan dan keseimbangan secara terus-menerus, dan oleh karena itu kebudayaan itu sifatnya adalah kreatif. Ia melahirkan peradaban, yaitu wahana dan sarana yang memudahkan perkembangan jalan kepada kesempurnaan, kebaikan, persatuan, kemajuan, pembangunan, baik di dalam hal yang menyangkut nilai-nilai maupun hal-hal yang menyangkut institusi-institusi.

Kebudayaan itu bersifat *historis, evolutif* dan *organis*. Ia berkembang terus-menerus. Ia tumbuh menjadi anak-beranak, bercabang-cabang. Menurut Ki Hadjar, kebudayaan itu dapat lahir, kawin (cultural diffusionism), menjadi dewasa, sehat, sakit dan dapat pula mati. Kebudayaan itu tumbuh di dalam suatu dialektika antara *proses multiplikatif* (yang menumbuhkan kompleksitas, kemajemukan, diversitas, divergensi, desintegrasi) dan *proses*

centrifikatif (kecenderungan yang menumbuhkan interdependensi, pertemuan dari berbagai unsur, mendamaikan, mempersatukan, menuju kepada unitas, konvergen, integratif). Ia juga berada di dalam dialektikanya tantangan (challenges) di satu pihak dan jawaban (responses) di lain pihak. Di dalam dialektika ini kebudayaan akan selalu tumbuh sebagai evolusi kreatif, dan secara terus-menerus mencari keseimbangan-keseimbangan baru.

Dalam pengertian inilah kiranya kita harus menafsirkan arti dari kata *manusia seutuhnya* dan makna dari *wawasan keselarasan, keseimbangan dan keserasian*. Semua itu bukan pengertian-pengertian statik, melainkan pengertian-pengertian dinamik, evolusioner, yang harus dihayati secara dialektikal dan kreatif.

PROFESI DAN DEMOKRASI

Marilah sekarang kita selami pengertian mengenai profesi dan demokrasi di dalam konteks kultural sebagai dikemukakan di atas itu.

Sebagai bagian dari pertumbuhan kebudayaan, profesi dan demokrasi adalah pengertian-pengertian yang tidak statik, melainkan pengertian-pengertian yang dinamik, organis, evolusioner, dialektis. Profesi dan demokrasi terjadi di dalam sejarah dan tumbuh berkembang di dalam sejarah. Profesi dan demokrasi bukanlah pengertian yang ada sebelum terjadinya sejarah manusia, sejak awal mula, bersifat intelektual, esensialistik serta eternal, perenial, final dan total, sehingga manusia tinggal membuat penerapan-penerapan daripadanya.

Profesi dan demokrasi adalah pengertian yang kompleks, tumbuh dipacu oleh tegangan dialektikanya faktor multiplikatif di satu pihak dan *centrifikatif* di lain pihak, dipacu oleh adanya challenges di satu pihak dan responses di lain pihak. Maka itu tidak ada blueprint perenial serba tuntas mengenai pengertian profesi dan demokrasi. Kalaupun kemudian kita dapat mengangkat beberapa elemen yang sifatnya universal, yang mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai *het algemeen menselijke*, semua ini pun terjadi dan diketemukan di dalam sejarah sebagai bagian dari evolusinya kebudayaan, sebagai bagian dari interaksi kultural, komunikasi kultural, bagian dari apa yang dinamakan *cultural diffusionism* dan *akulturasi*.

Pertumbuhan Profesionalisme

Kapan istilah profesi mulai dipakai di dalam sejarah sampai hari ini masih sukar untuk diketemukan. Kata profesi dan profesionalisme, sebagai per-

adaban modern, tumbuh sebagai bagian dari pertumbuhan kebudayaan Barat, namun kemudian melalui interaksi kultural dalam arus *cultural diffusionism*, tersebar ke seluruh dunia ini.

Survei sejarah mengemukakan bahwa istilah *profesio* (dari kata Latin *profiteor*) mulai menjadi kaprah dalam abad pertengahan Eropa, khususnya berkenaan dengan organisasi kepemimpinan di dalam gereja Katolik (Hirarki). Mereka yang menduduki jabatan di dalam kepengurusan gereja itu harus mengucapkan *janji* (sumpah) dan kemudian *dilantik*. Maka itu profesio mempunyai arti majemuk: janji, sumpah, jabatan dan pelantikan. Profesio semacam ini mempunyai berbagai persyaratan untuk keabsahannya, di antaranya pada waktu itu adalah penguasaan filsafat, theologia dan hukum gereja.

Istilah profesi selanjutnya terkait dengan terjadinya penataan-penataan berkenaan dengan jabatan, pekerjaan atau fungsi, serta syarat-syaratnya baik syarat prosedural maupun syarat substansial agar diperoleh *lisensi yang absah*, dan dipertegas *kompetensi*.

Sudah sejak zaman pertengahan itu pula di samping profesi kegerejaan telah pula tumbuh profesi lain, yaitu di bidang hukum dan bidang medikal (kedokteran, pengobatan). Profesi ini terkait dengan perkembangan dunia akademik-universiter. Pada zaman itu dunia universiter terutama diwarnai oleh perkembangan tiga disiplin, ialah filsafat dan theologia, hukum dan kedokteran (pengobatan).

Dari perkembangan itulah tumbuh konsep profesionalisme modern, yaitu adanya jabatan atau pekerjaan tertentu, yang mempunyai keabsahan yang diakui karena memenuhi persyaratan-persyaratan baik yang bersifat substansial maupun yang bersifat prosedural. Terkandung di dalamnya adanya keahlian dalam bidang tertentu yang kualitasnya mendapatkan jaminan akademik-universiter. Profesionalisme tumbuh terkait dengan perkembangan ilmu, filsafat, theologi, baik dalam pengertian sebagai proses, produk maupun masyarakat.

Perkembangan menjadi kompleks karena di luar civitas akademika telah tumbuh pula keahlian-keahlian lain, seperti misalnya yang terbentuk melalui gilda-gilda. Profesionalisme terjadi secara evolutif, dan evolusi profesionalisme ini mencerminkan sifat dasar kebudayaan. Pertama-tama profesionalisme itu tumbuh karena ada tegangan antara challenges dan responses, disebabkan karena terjadinya proses multiplikasi, yang menimbulkan kompleksitas, heterogenitas, di dalam pekerjaan dan fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Pada awalnya orang belum begitu menghiraukan adanya ahli-ahli yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, namun lama-kelamaan

diperlukan adanya tuntutan penataan. Di bidang keagamaan misalnya, *theologia* tumbuh secara multiplikatif: ada banyak pusat-pusat *theologi*, dan banyak aliran-aliran keagamaan, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kenyataan ini telah membuat *theologi* (pemikiran keagamaan) menjadi kompleks dengan berbagai komplikasi, terutama apabila masing-masing menyatakan klaim secara mutlak. Maka timbullah desakan mengadakan penataan (*sentrifikasi*), sehingga terdapat satu acuan dan patokan-patokan untuk membedakan mana yang mempunyai kompetensi yang sah, mana yang tidak mempunyai keabsahan, khususnya yang terkait dengan posisi-posisi formal di dalam jabatan kepemimpinan gerejani.

Bidang filsafat, hukum dan kedokteran pun berkembang demikian pula. Ada filsuf-filsuf *formal* dan *non-formal*, dan banyak pula pusat-pusat kefilsafatan dengan berbagai macam aliran kefilsafatan. Filsafat menjadi multiplikatif, dan sebagai reaksi terhadap pertumbuhan ini maka terjadilah usaha-usaha penataan (*sentrifikatif*) yang menyangkut pusat-pusatnya (masyarakat kefilsafatan), hak-haknya sebagai ahli kefilsafatan (lisensiat kefilsafatan) baik secara prosedural maupun secara substansial. Terjadilah proses *akreditasi*. Bidang hukum juga tumbuh secara multiplikatif, apalagi karena hukum banyak keterlibatannya dengan masalah politik-kemasyarakatan dan keagamaan. Sebagai reaksi terhadap perkembangan yang kompleks itu maka terjadi pula proses penataan. Begitu pula halnya dengan bidang kedokteran. Pada awalnya di samping kedokteran di universitas, terdapat praktek ketabiban di luar universitas. Ada tabib-tabib formal universiter, ada tabib-tabib *non-formal*. Ada dokter ada dukun. Disiplin kedokteran pun tumbuh secara multiplikatif. Penataan dirasa amat perlu karena bidang ini menyangkut hidup manusia.

Profesi yang juga termasuk awal adalah ahli perbintangan. Pada awalnya terdapat pembauran antara astrologi dan astronomi. Perkembangan pengetahuan ilmiah dan sifat akademik universiter membawa pembedaan yang tajam antara keduanya.

Sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan, profesionalisme itu dibentuk pula oleh tegangan dialektis antara sifat-sifat yang berlawanan: antara dinamika dan keterbatasan, antara praksis dan teori, antara *accepted moral values* dengan perubahan-perubahan nilai. Profesi pada awalnya merupakan suatu proses penataan untuk menjaga kualitas, menjaga kompetensi dan perkembangan yang sebaik-baiknya dan menjauhkan praktek-praktek yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Namun sebagai penataan, profesionalisme menjadi suatu pembatasan terhadap dinamika itu. Hal ini terasa di dalam interaksi antara mereka yang mengembangkan keahliannya di universitas dengan mereka yang mengembangkan keahliannya di luar universitas:

antara *practitioner* dan *theoreticians*. Institusionalisasi memang tidak jarang menjadi pembatas yang sifatnya struktural. Tidaklah mengherankan bahwa kemudian ada yang memandang profesionalisasi sebagai bagian dari proses *birokratisasi*, bahkan alat dari monopoli status quo. Dalam hal seperti ini profesionalisme tumbuh menjadi suatu establishment. Masalahnya menjadi tajam apabila di dalam perkembangan ini terkait pula soal nilai-nilai, khususnya nilai-nilai moral baik budi pekerti kultural maupun moral keagamaan. Dalam hal ini profesionalisme dapat merupakan benteng dari *accepted moral values* (maka terjadi konflik intra profesi itu sendiri) atau sebaliknya profesionalisme menjadi penggalang dari perubahan (dan konfliknya menjadi eksternal, misalnya saja dengan masyarakat luas, institusi keagamaan, hukum, negara dan sebagainya).

Berbeda dengan organisasi politik kenegaraan (di mana proses birokrasi itu tumbuh), maka profesionalisme sebagai organisasi tumbuh di dalam jalur non-formal, *jalur kemasyarakatan*, artinya bukan di dalam jalur politik kenegaraan. Dalam kaitan inilah maka profesionalisme itu kemudian lazim didukung oleh suatu Kode Etik yang tidak berfungsi sebagai norma hukum melainkan sebagai norma kemasyarakatan khusus tertentu. Perkembangan seperti ini juga membawa kompleksitas di dalam interaksi antara tumbuhnya institusi formal di satu pihak dengan institusi non-formal di lain pihak; yang dapat mengambil berbagai bentuk: berjalan sendiri-sendiri (*iuxta positif*), berjalan secara asosiatif (kerjasama), atau berjalan secara konfliktif. Ini menunjukkan bahwa profesionalisme itu bukanlah hal yang mempunyai otonomi mutlak, karena terjadi dan tumbuh di dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas. Di sementara negara misalnya soal kompetensi dan perizinan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Peranan negara ikut berbicara. Juga di dalam rangka menentukan kriteria-kriteria, kadang-kadang dibentuk panitia negara.

Semua uraian di atas itu sekedar untuk menunjukkan bahwa profesionalisme itu terjadi di dalam sejarah, sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan. Profesionalisme mencerminkan sifat dasar kebudayaan manusia, dengan segala masalah dan kemungkinannya. Profesionalisme bukanlah hal yang terjadi sejak awal dunia, tidak pula merupakan suatu bentuk yang total dan final, melainkan bentuk yang semakin tumbuh, semakin terjadi, terbentuk dan dibentuk di dalam sejarah. Profesionalisme modern baru menemukan pertumbuhan jelas di sekitar abad 15, jadi jauh sesudah perjalanan sejarah kebudayaan umat manusia. Di beberapa negara profesionalisme mengalami pertumbuhan pada abad 19 dan awal abad 20.

Pada garis dasarnya profesionalisme tumbuh berkaitan dengan tumbuhnya *fungsi-fungsi* di dalam masyarakat, terkait dengan pekerjaan, jabatan, tetapi juga nafkah. Profesionalisme mengandung di dalamnya *orientasi fung-*

sional terutama karena sejarah kebudayaan dan peradaban membawa serta terjadinya multiplikasi fungsi dan diversifikasi fungsi. Profesionalisme juga mengandung unsur *penataan* terhadap orang-orang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tersebut. Sebagai suatu proses penataan profesionalisme berkaitan dengan masalah keahlian, kompetensi, akreditasi, kualitas keahlian, lisensiat (perizinan untuk melakukan profesinya), yang kriteria-kriterianya menjadi terkait dengan perkembangan pengetahuan, disiplin ilmiah, pendidikan (walaupun ada perbedaan antara kriteria akademik dan kriteria profesional), sehingga profesionalisme dapat pula dipandang sebagai bagian evolusi pengetahuan. Di dalam perkembangan saat ini pertumbuhan profesionalisme tentu akan banyak sangkut-pautnya pula dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi modern, yang tumbuh secara cepat dan kompleks pula. Walaupun lazim dikatakan bahwa profesi itu mempunyai otonomi sendiri, namun otonomi itu bukanlah otonomi mutlak, melainkan otonomi di dalam keterbatasan. Profesionalisme bukanlah hal yang berdiri sendiri.

Evolusi profesionalisme, baik yang telah lalu maupun yang akan datang secara potensial akan selalu mengandung konflik-konflik: antara orientasi praktikal dan teoretikal, antara dinamika dan keterbatasan, antara kecenderungan ke arah yang tidak baik dan kecenderungan ke arah yang baik, antara otonomi tertutup dan otonomi terbuka, dan lain sebagainya. Profesionalisme sebagai wahana kultural adalah upaya agar segala perkembangan itu tumbuh menempuh jalur kebudayaan.

Demokrasi

Berbeda dengan profesi, mengenai demokrasi sudah terdapat banyak penelitian mengenai sejarahnya. Kata demokrasi sudah terpakai pada zaman Yunani Kuno dan seterusnya mengalami perkembangan sebagai bagian dari sejarah masyarakat dan kebudayaan Barat (Eropa) yang melalui proses cultural difusionism menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia.

Penelusuran sejarah itu pun mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bagian dari perkembangan kebudayaan. Demokrasi terjadi di dalam sejarah masyarakat dan kebudayaan, dan mengalami evolusi di dalam perkembangan sejarah itu pula. Demokrasi adalah pengertian yang kompleks, evolutif, dinamik, dialektis, dibentuk oleh kecenderungan ke arah multiplikasi dan sentrifikasi, tumbuh antara challenges dan responses.

Demokrasi sebagai bagian dari evolusi kebudayaan tumbuh dan berkembang dengan ditentukan pula oleh tantangan persatuan alam dan zaman yang menjadi konteksnya. Bahwa demokrasi itu bersifat evolutif hal ini sudah da-

pat kita lihat dari sejarah arti kata *demos* itu sendiri. *Demos* di dalam pengertian pada zaman Yunani memang berarti rakyat dan ada konotasinya dengan pengertian rakyat kecil, rakyat miskin. Namun pengertian *demos* di dalam alam pikiran Plato dan Aristoteles misalnya, yang banyak dipandang sebagai cikal bakalnya pemikiran mengenai demokrasi itu, mengandung di dalamnya suatu hal yang saat ini dapat dipandang sebagai diskriminasi. Plato dan Aristoteles masih menerima adanya institusi perbudakan, dan memandang mereka ini tidak masuk ke dalam klasifikasi *demos*.

Di dalam masyarakat Romawi Kuno, paham demokrasi itu dirumuskan di dalam lambang yang berbunyi: *Senatus Populusque Romanus*, yaitu dewan senat bersama dengan seluruh rakyat Romawi. Kata *populus* memang dapat dipandang sebagai terjemahan dari rakyat (*demos*), namun demikian kata *populus* mempunyai di dalamnya konotasi etnis yang juga mengandung sifat diskriminatif. *Populus Romanus* adalah bangsa Romawi, yang berkonotasi etnis, dan kemudian juga mempunyai konotasi yuridis, (melalui proses hukum orang yang secara etnis bukan orang Romawi dapat mendapatkan status sebagai orang Romawi). Namun demokrasi di zaman Romawi Kuno itu mungkin juga lebih dikaitkan dengan yang menjadi tujuannya yaitu mewujudkan *res publica*, yaitu *bonum commune*. Secara implisit ini membawa masalah antara demokrasi sebagai wadah dan demokrasi sebagai isi. Sebab seorang kaisar seperti Augustus mendapat pengakuan sebagai tokoh yang dapat mewujudkan *res publica* bagi bangsa Romawi. Dan memang pada zaman kaisar itu Romawi Kuno memperoleh puncak kejayaannya.

Apakah di zaman abad pertengahan Eropa ada terdapat demokrasi, tidak begitu banyak studi mengenai hal ini. Memang banyak diakui bahwa masuknya agama Nasrani ke Eropa membawa serta tumbuhnya kesadaran akan adanya persamaan kodrat dan derajat dari semua manusia. Walaupun demikian ditinjau secara institusional maka di zaman itu yang tumbuh adalah paham mengenai kedaulatan raja berdampingan dengan paham mengenai kedaulatan agama. Paham-paham seperti ini jelas mengandung di dalamnya suatu sikap dasar yang diskriminatif. Raja memandang dirinya sebagai penguasa yang mutlak. Agama juga merasa memiliki kewenangan untuk mengadakan claim absolut. Kenyataan itu yang selanjutnya memacu terjadinya zaman modern Eropa. Zaman ini melahirkan konsep demokrasi modern, dalam arti ajaran mengenai kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi modern itu persamaan derajat manusia tidak lagi ditempatkan atas dasar keagamaan yang bagaimanapun akan bersifat diskriminatif dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk penataan dunia secara rasional. Demokrasi modern, atau kedaulatan rakyat, adalah paham yang pada mulanya memusuhi ajaran kedaulatan raja maupun kedaulatan agama, bahkan nantinya membuang (atau sekurang-kurangnya menjadi acuh tak acuh terhadap) Tuhan

dalam hubungannya dengan manusia. Demokrasi modern sebagaimana lahir sebagai bagian kebudayaan Barat adalah suatu paham sekular. Wawasan kedaulatan rakyat ini menjadi daya penggeraknya revolusi Prancis dan revolusi Amerika. Walaupun begitu kenyataan-kenyataan yang terjadi selama revolusi Prancis dan peristiwa-peristiwa sesudah itu membuat sementara orang mempermasalahkan *validitas mendasar* dari ajaran kedaulatan rakyat tersebut, sehingga melahirkan serangkaian ajaran-ajaran baru mengenai kedaulatan: ada yang mau kembali kepada kedaulatan Tuhan, kedaulatan agama, ada ajaran mengenai kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan ekonomi.

Demokrasi modern itu juga membawa tumbuhnya paham nasionalisme modern di Eropa. Rakyat mendapatkan perwujudannya di dalam apa yang dinamakan bangsa dan negara. Namun wawasan kebangsaan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh konotasi etnisitas dan kadang-kadang juga kebahasaan. Demokrasi modern yang pada awalnya menitikberatkan persamaan (*equality*) derajat kemanusiaan, kemudian mengalami perubahan fokus yang menekankan kemerdekaan, *freedom*, *liberty*, yang di dalam perkembangannya membawa jalinan antara kemerdekaan politik dengan kemerdekaan ekonomi (*individualisme politik dengan liberalisme ekonomi*). Tumbuhnya sosialisme, terutama Marxisme dan Komunisme membawa pengertian *demos* di dalam kata demokrasi itu terkait dengan konotasi kaum miskin, kaum pekerja, kelas proletar. Demokrasi menjadi perjuangan kelas, menghapuskan *exploitation de l'homme par l'homme*, dan selanjutnya oleh Lenin dan Stalin dikaitkan dengan perjuangan mewujudkan masyarakat komunis Internasional. Menghadapi munculnya kekuasaan komunis sesudah Perang Dunia Kedua, maka Amerika Serikat memberi fokus dan tekanan paham demokrasi dengan konotasi kebebasan, kemerdekaan, namun tampaknya pihak komunis pun tidak tinggal diam sehingga tumbuhlah sesudah Perang Dunia Kedua itu apa yang disebut sebagai "liberation movement," liberation front sebagai bagian dari strategi dan taktik gerak sosialisme komunisme internasional.

Uraian ini sekedar untuk memberikan gambaran betapa pengertian *demos* dan demokrasi itu kini menjadi multiplikatif dan kompleks, sehingga S.I. Benn menulis sebagai berikut:

Democracy is difficult to define, not only because it is vague, like so many political terms, but more importantly because what one person would regard as a paradigm case another would deny was a democracy at all. The word has acquired a high emotive charge in the last hundred years; it has become good tactics to apply it to one's own favoured type of regime and to deny it to rivals. The most diverse systems have been claimed as democracy of one sort or another, and the word has been competitively redefined to match changes in extension by appropriate changes in intention.

Semua itu dapat kita pandang sebagai proses wajar manakala kita menempatkan demokrasi itu bukan sebagai pengertian yang sejak dari awalnya serbe-

lengkap, semuanya serba jelas dan serba total dan tuntas, melainkan sebagai hal yang terjadi di dalam sejarah, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan manusia. Karena itu maka demokrasi mencerminkan pula hal-hal yang termasuk ke dalam sifat dasarnya kebudayaan, sebagaimana sudah banyak diuraikan di depan. Bahwa kemudian terdapat elemen-elemen dasar yang diterima sebagai ciri-ciri universal demokrasi, hal ini pun terjadi dan diangkat dari pengalaman-pengalaman di dalam sejarah. Demokrasi saat ini menjadi multiplikatif, kompleks dan berbau dengan pemikiran-pemikiran mengenai hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Demokrasi terbau dengan ajaran kedaulatan hukum, terbau dengan tantangan-tantangan sosial ekonomi, dengan pendidikan, dengan persamaan dan dengan kemerdekaan dengan republik tetapi juga dengan monarki.

Walaupun secara teoretikal kita dapat berpikir mengenai demokrasi direk, namun dewasa ini aktualisasi direk menjadi makin langka dan hampir mustahil di dalam perubahan masyarakat dan politik modern yang secara kultural dan kemasyarakatan tumbuh menjadi *multiplikatif dan kompleks*: secara demografis (multiplikasi aktor), secara peradaban (informasi, komunikasi, tulisan, organisasi sebagai multiplikasi alat) dan aspirasi dan permasalahan-permasalahan di dalamnya (multiplikasi issues).

Demokrasi juga telah menjadi bagian dari proses diffusionisme kultural, yang dari satu pihak memacu pertumbuhan kebudayaan manusia, dari lain pihak tidak jarang membawa efek sampingan berupa kekacauan politik di dalamnya. Dan proses seperti ini masih terjadi terus.

Sekarang ini demokrasi tidak hanya merupakan problem dan cita-cita politik nasional. Demokrasi juga menjadi cita-cita dan problem pertumbuhan politik global. Demokratisasi bukan melulu proses yang secara sosiologis terbatas pada suatu wilayah kedaulatan. Di sini pun masalahnya amat banyak.

Arus demokrasi modern seperti itu pula yang mengalir masuk ke Indonesia; di sekitar awal abad kedua puluh ini. Demokrasi, terbawa oleh arus proses *cultural diffusionism*, sampai ke Indonesia. Dan bangsa Indonesia menanggapi dengan akulturasi yang kreatif.

Akulturasi-kreatif tersebut dapat kita lihat dengan mengamati bagaimana pengertian demos di dalam kata demokrasi itu mengalami perkembangannya di Indonesia. Demos diterjemahkan ke dalam kata rakyat. Namun di samping itu (dan kiranya hal ini juga dipengaruhi oleh aliran nasionalisme modern di Eropa) terdapat pula istilah bangsa. Bahwa demokrasi diterjemahkan di dalam "begrip" kerakyatan, hal ini tidak mustahil disebabkan karena dengan melihat bahwa inti dasar demokrasi tersebut adalah persamaan dan kebersamaan, maka haruslah dihindarkan paham demokrasi dengan konotasi horrius

sebagaimana terjadi di dalam revolusi Prancis, sehingga dengan demikian demokrasi sekedar menjadi alat dan menjadi keuntungan strata tertentu di dalam masyarakat. Istilah kerakyatan juga dipergunakan untuk membedakan dengan demokrasi proletariat yang oleh aliran komunis mau diwujudkan melalui proses revolusi dan proses diktator proletariat itu.

Bahwa demokrasi secara mendasar diberi arti yang konotasi dasarnya adalah persatuan berdasarkan persamaan dan kebersamaan, hal itu menjadi jelas di dalam pertumbuhan wawasan kebangsaan Indonesia. Rakyat Indonesia mempunyai titik pertemuan mendasar di dalam wawasan kebangsaan tersebut. Dan berbeda dengan pertumbuhan nasionalisme di Barat, maka wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan yang acuan dasarnya adalah persatuan dan persamaan, sehingga wawasan kebangsaan Indonesia tersebut tidaklah diacukan kepada konotasi-konotasi yang diskriminatif seperti misalnya daerah, asal-usul, keturunan, kesukuan, mayoritas-minoritas (misalnya Jawa), agama ataupun aliran kepercayaan.

Begitulah maka paham demokrasi dan nasionalisme yang masuk dari alam pikiran Barat ke Indonesia itu diolah secara mendasar dan kreatif dan melalui proses akulturasi itu kita sekarang ini mengenal istilah kerakyatan dan istilah kebangsaan Indonesia.

Dalam pada itu seluruh perkembangan demokrasi yang menjadi multiplikatif itu pun masuk ke dalam pertimbangan maka bagi kita demokrasi itu bukanlah sekedar demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan.

Proses akulturasi itulah yang kemudian melahirkan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi nasional sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Proses akulturasi ini juga tercermin di dalam gagasan dasar yang tertuang di dalam Konstitusi Proklamasi kita yaitu UUD 1945.

Proses akulturasi itu pulalah yang menumbuhkan demokrasi Pancasila kita. Demokrasi modern kita jadikan bagian dari perkembangan kebudayaan kita. Demokrasi Pancasila itu pun akan berkembang secara historis, evolutif, akan diuji oleh tumbuhnya proses multiplikasi dan kompleksifikasi di dalam perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, akan menghadapi *challenges*-nya, dan oleh karena itulah harus dikembangkan secara kreatif.

KUALITAS DPR HARUS PROFESIONAL

Dengan memandang demokrasi sebagai hal yang evolusioner, maka tidak mengherankan apabila di dalam saat-saat tertentu kita akan dibedakan ke-

pada masalah peningkatan kualitas dari demokrasi tersebut. Evolusi membawa di dalamnya *stages of qualitative development*.

Di dalam konteks seperti itulah maka perlu ditanggapi terjadinya diskusi mengenai kualitas Dewan Perwakilan Rakyat kita.

Mengapa yang menjadi fokus adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak misalnya saja kualitas Pemerintahan? Kalau kita perhatikan berbagai argumentasi dan pemikiran yang terungkap dari berbagai diskusi politik ini, sesungguhnya secara implisit juga dipermasalahkan mengenai posisi pemerintah itu pula. Akan tetapi bahwa dalam problem demokrasi itu membawa fokus kepada peranan DPR, dapatlah diterangkan dengan memperhatikan dua faktor: *pertama*, adalah kalender politik nasional kita; *kedua*, adalah hal perwakilan sebagai salah satu peradaban utama demokrasi. Mengenai yang pertama tidak akan banyak dikupas. Mengenai yang kedua perlu diberikan beberapa catatan.

Catatan pertama dalam hal perwakilan ini menyangkut masalah pelaksanaan demokrasi: *direk* ataukah *indirek*. Di muka sudah saya kemukakan bahwa demokrasi sebagai bagian dari proses pertumbuhan kebudayaan manusia yang menjadi multiplikatif dan kompleks menyebabkan pelaksanaan demokrasi secara *direk* itu menjadi makin sukar. Demokrasi atau kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dengan pengertian perwakilan ini pun juga tumbuh menjadi kompleks pula: tidak sekedar mewakili orang-orang tetapi lebih-lebih mewakili kepentingan. Semua itu tumbuh bersamaan dengan berkembangnya peradaban-peradaban modern seperti misalnya: peradaban tulisan, organisasi dan informatika. Di dalam pertumbuhan demokrasi modern terjadilah proses multiplikasi aktor politik, ekonomi, kemasyarakatan, multiplikasi "issue" dan permasalahan serta multiplikasi sarana. Pelaksanaan dari prinsip perwakilan pun juga mengalami berbagai macam variasi, dan karena itulah terdapat beberapa macam stelsel pemilihan. Kita saat ini sudah mempunyai patokan-patokan yang menjadi kesepakatan bersama, antara lain dituangkan di dalam UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik dan Golongan Karya, UU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD. Semua ini berjalan sebagai pilihan-pilihan nasional yang diambil melalui proses diskusi dan musyawarah lama. Jadi bukan pilihan yang terjadi begitu saja.

Seperti halnya mengenai demokrasi, maka yang dinamakan sistem perwakilan itu pun terjadi di dalam proses sejarah. Tidak ada sistem perwakilan yang sifatnya *perennial*, serba sempurna, serba tuntas dan total. Sistem pemilihan itu akan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang majemuk, dan sistem perwakilan itu merupakan bagian dari proses dan produk interaksi antara

kekuatan multiplikatif di satu pihak dengan kekuatan sentrifugatif di lain pihak, atau dalam dalil yang lebih kita kenal: sesuai dengan dinamika sifat dasar masyarakat yang *bhinneka tunggal ika*.

Salah satu jawaban yang tidak jarang dikemukakan terhadap masalah mengenai ditingkatkannya kualitas DPR ini adalah gagasan untuk meningkatkan kualitas DPR kita melalui proses profesionalisasi. Dapat tidaknya kesimpulan ini disetujui tentu saja amat tergantung dari apa yang dimaksud dengan arti profesionalisasi tersebut. Kalau profesionalisasi, misalnya, dikaitkan dengan fungsi, kompetensi, akreditasi, kode etik dan persyaratan-persyaratan yang sifatnya ilmiah, maka hal ini tentu mengandung persoalan. Implikasi pengertian itu adalah bahwa anggota-anggota DPR itu harus terdiri dari sarjana, artinya yang menyelesaikan pendidikan akademik universitas. Sesudah pertanyaan mendasar mengenai hal ini menyangkut pertama-tama pembedaan fungsi akademik dan fungsi politik. Seorang *political scientist* belum tentu ia adalah seorang *politician* yang tangguh, seperti halnya seorang sarjana pendidikan belum tentu adalah seorang pendidik yang baik. Salah satu implikasi yang harus dijauhi dari pemikiran seperti itu adalah jangan sampai politik itu menjadi fungsi dan kompetensi yang bersifat *elitis-intelektualistik*, sehingga demokrasi nantinya akan menjadi sekedar milik dan monopoli dari strata elit intelektualistik tersebut. Begitu pula halnya dengan kualifikasi ekonomi sebagai persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Kita harus menghindari agar lembaga politik ini tidak menjadi monopoli elit-elit ekonomi saja. Politik dan negara itu tidak hanya menjadi milik orang-orang yang kaya saja. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bagaikan sebuah lalu lintas di mana terbuka kemungkinan laju mobilitas vertikal maupun laju mobilitas horisontal. Politik itu cakupan dan cakupannya lebih luas. Orang berpolitik karena ada panggilan, ada perjuangan. Politik kebangsaan meminta adanya kesadaran dan motivasi panggilan perjuangan kemerdekaan.

Maka itu yang pertama-tama perlu dikemukakan sehubungan dengan profesionalisasi di sini haruslah dikaitkan dengan penataan fungsi, di mana kiranya perlu dipertegas bahwa fungsi DPR adalah fungsi politik kenegaraan, konstitusional, dan karena itu prosedur dan mekanisme, maupun cara kerjanya terbentuk juga melalui prosedur dan mekanisme politik, kenegaraan, konstitusional. Dalam hal ini bagi kita pembentukan itu berarti melalui organisasi sosial politik (Partai Politik dan Golongan Karya) di dalam pemilihan umum. Di dalam sistem ini maka tanggung jawab untuk menjadi profesional atau sekurang-kurangnya meningkatkan kualitas, itu terutama terletak pada peranan organisasi-organisasi sosial politik tersebut. Adalah organisasi-organisasi politik inilah yang akan menentukan meningkatnya kualitas dari sistem perwakilan kita sesuai dengan tuntutan perkembangan. Profesionalisasi

sasi politik tidak pertama-tama ada pada para anggota DPR, akan tetapi pertama-tama harus menjadi bagian dari perkembangan organisasi-organisasi sosial politik. Inilah sistem yang sudah menjadi pilihan kita.

PERTUMBUHAN PROFESIONALISME PADA UMUMNYA DAN POLITIK

Problem peningkatan kualitas DPR sebagai bagian dari evolusi demokrasi di Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai hal yang berdiri sendiri. DPR adalah hanya satu unsur (tentu saja penting) di dalam sistem demokrasi kita, dan unsur ini pun berada di dalam interelasi dan interdependensi dengan berbagai unsur dan berbagai faktor. Kita dapat mulai misalnya saja dengan menghadapi pertanyaan: kriteria atau acuan apakah yang seyogyanya kita gunakan untuk menilai mengenai kualitas perwakilan DPR tersebut? Karena DPR merupakan suatu fungsi dan institusi di dalam sistem demokrasi Pancasila yang didasarkan atas UUD 1945, tentu saja kita tidak dapat membuat suatu ulasan mengenai *DPR an sich* atau *DPR in abstracto*. DPR di manapun juga selalu DPR yang berada di dalam suatu konteks politik, hukum dan sosio budaya, termasuk DPR kita. Itulah sebabnya maka di dalam menjawab pertanyaan mengenai kualitas DPR kita harus mulai dengan melihat apakah DPR telah melaksanakan fungsi sesuai dengan sistem yang dimaksud oleh Konstitusi kita, baik ditinjau secara mikro (yaitu berkenaan dengan pasal-pasal khusus mengenai DPR) maupun secara makronya (ditinjau berkenaan dengan seluruh Konstitusi itu, yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, bahkan sampai kepada pelaksanaan GBHN, termasuk APBN setiap tahunnya untuk itu).

Peningkatan kualitatif dari pertumbuhan demokrasi, termasuk peranan institusi dan fungsi perwakilan, juga akan ditentukan oleh evolusi kultural dari masyarakat sendiri. Dalam hal ini sekurang-kurangnya dua hal akan menjadi faktor yang amat penting: *kecerdasan dan kesejahteraan*. Suasana dan tingkat kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat akan ikut memberi warna dan corak dari kualitas demokrasi. Dengan perkataan lain meningkatkan kualitas fungsi-fungsi dan institusi di dalam perkembangan demokrasi akan ditentukan pula oleh berhasil tidaknya proses pembangunan.

Kalau kita melihat perkembangan demokrasi, termasuk di dalamnya penataan fungsi dan institusi masyarakat secara kultural, di dalam peta perkembangan yang kompleks namun interdependen, maka kita akan melihat betapa *tumbuhnya profesionalisme* pada umumnya sebagai bagian dari perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita, memang akan menjadi elemen yang besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan demokrasi kita nantinya.

Seperti halnya dengan demokrasi, profesionalisme sebagai phenomen modern itu pun telah dibawa arusnya *cultural diffusionism* masuk ke Indonesia. Dan proses tersebut pun sekurang-kurangnya semenjak zaman Orde Baru, tampaknya telah mulai ditanggapi secara *akulturatif*, walaupun proses itu saat ini belum selesai dan belum menemukan bentuk-bentuk yang mantap. Bagi Indonesia, profesionalisasi tampaknya pertama-tama dipandang sebagai penataan fungsi-fungsi yang majemuk di dalam masyarakat. *Orientasi fungsional* merupakan hal yang pokok di dalam perkembangan profesionalisme. Di dalam sejarah politik Indonesia modern terjadinya kelompok-kelompok profesi mempunyai kaitan dengan tumbuhnya orientasi fungsional (terjadinya konsep-konsep fungsional), yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah Golongan Karya.¹ Namun perkembangan saat ini tampaknya mengundang beberapa permasalahan, antara lain sejauh mana gagasan mengenai golongan fungsional tersebut masih merupakan bagian yang esensial di dalam eksistensi Golongan Karya.

Penataan fungsi-fungsi tersebut dirasa perlu terutama sebagai jawaban terhadap kekacauan politik di masa lampau, tetapi juga terhadap tantangan proses kemajuan yang akan membawa serta terjadinya diversifikasi fungsi-fungsi, multiplikasi institusi-institusi, yang dapat menjadi pilar-pilar pembangunan dan kemajuan tersebut. Proses ini akan membawa tantangan yang sifatnya kualitatif di dalam pelaksanaan dari fungsi-fungsi itu. Maka itulah fungsi-fungsi ini perlu memenuhi berbagai persyaratan: ideologis, etis, kompetensi yang dijamin oleh adanya keahlian (baik yang memerlukan dukungan pendidikan universitas maupun yang tidak memerlukan pendidikan universitas), dan lain sebagainya. Berbeda dengan partai politik dan Golongan Karya, yang mengemban fungsi politik, maka golongan fungsional atau kelompok profesi ini mengemban fungsi kemasyarakatan. Di sinilah letak strategis dari tumbuhnya organisasi profesi itu bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Organisasi profesi sebagai organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang akan mempunyai hubungan (interaksi dan komunikasi) erat dengan masyarakat, dengan rakyat. Ia akan menjadi wakil aktual dari aspirasi masyarakat. Tetapi ia tidak mempunyai fungsi politik. Agar aspirasi tersebut menjadi atau sekurang-kurangnya masuk sebagai bahan untuk pilihan politik formal, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengadakan dialog politik dengan Partai Politik atau Golongan Karya. Di dalam dialog ini organisasi profesi/fungsional menyampaikan aspirasi-aspirasinya, mengungkapkan kenyataan-kenyataan real kemasyarakatan, mengemukakan program-programnya dan pilihan-pilihannya, dan menawarkan semua itu kepada organisasi politik,

¹Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, CSIS.

dengan beberapa imbal kepentingan: misalnya saja organisasi profesi ini kalau aspirasi dan programnya diambil oleh organisasi politik, maka ia akan berkampanye untuk mendapatkan suara bagi organisasi politik tersebut di dalam pemilihan umum. Tidak mustahil masih ditambah dengan penawaran lebih lanjut: organisasi profesi/fungsional ini sebagai imbal kepentingannya meminta agar beberapa orang anggotanya dijadikan calon untuk duduk di DPR. Sekarang ini pola interaksi antara organisasi profesi dengan organisasi politik seperti itu memang belum terjadi, akan tetapi perkembangan di masa yang akan datang tampaknya akan banyak sekali diwarnai dan ditentukan oleh interaksi seperti itu, terutama karena mereka semuanya harus makin memusatkan perhatian kepada program-program pembangunan (sebagai aktualisasi dari masing-masing fungsi) dan semuanya sudah berpegang kepada satu acuan ideologi yaitu Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, memang membuka jalan ke arah interaksi yang produktif dari organisasi politik di satu pihak dengan organisasi kemasyarakatan di lain pihak. Di masa yang akan datang organisasi profesi tampaknya akan merupakan organisasi yang mengenal dengan baik berbagai program yang diperlukan untuk pembangunan masyarakat, sehingga organisasi politik di dalam upayanya melaksanakan fungsinya harus mengadakan interaksi, dialog (dan tidak mustahil terjadi proses tawar-menawar imbal kepentingan) dengan organisasi-organisasi profesi. Hal ini akan memacu terjadinya proses politik yang tidak saja menjadi makin terkait dengan program aktual, akan tetapi juga membawa proses politik menjadi lebih kompleks dan membawa serta di dalamnya kemungkinan alternatif-alternatif dan variasi pilihan. Proses seperti ini dapat memacu perkembangan kualitas demokrasi kita, sebab di dalamnya interaksi tersebut Golongan Karya dan Partai Politik makin ditantang untuk mempunyai identitas dan kepribadian. Dengan perkataan lain politik di Indonesia yang menjadi semakin *program-oriented* di masa mendatang akan banyak memacu peranan organisasi profesi di dalam dinamikanya demokrasi Pancasila. Dalam pengertian inilah maka profesionalisasi politik tidak mustahil akan mempunyai dampak pula terhadap kualitas organisasi politik yang selanjutnya akan mempunyai dampak pula terhadap kualitas DPR kita di masa mendatang. Proses ini mungkin masih panjang, dan agar pertumbuhan seperti itu dapat terjadi secara evolusioner, Golkar memang masih harus memenangkan pemilihan umum mendatang ini, sehingga masih akan dapat meletakkan kerangka landasan bagi perkembangan masa depan yang akan menjadi makin tertata tetapi juga akan menimbulkan interaksi politik yang lebih kompleks dan bervariasi. Terjadinya proses tersebut akan membuat kehidupan politik tidak akan hanya berpola "deduktif," melainkan juga berpola "induktif," proses dari "atas" dan dari "bawah" berpadu. Politik tidaklah suatu penataan "a-priori" saja, melainkan juga suatu dinamika "a-posteriori."

DAFTAR PENYALUR

MAJALAH ANALISA, THE INDONESIAN QUARTERLY, DAN BUKU- BUKU TERBITAN CSIS:

- JAKARTA PUSAT:** *T.B. Adi Wacana*, Jl. Proklamasi 27; *T.B. Djambatan*, Jl. Kramat Raya 152; *T.B. Dessy*, Lantai III Blok 1 Proyek Senen; *T.B. Gramedia*, Jl. Gajah Mada 109; *T.B. Gramedia*, Jl. Pintu Atr 72; *T.B. Ghala Indonesia*, Pusat Perdagangan Proyek Senen Blok I Lt. IV/27-29; *BPK Gunung Mulia*, Jl. Kwitang 22; *T.B. Gunung Agung*, Jl. Kwitang 6 dan Ratu Plaza Jl. Jend. Sudirman; *T.B. Indira, Duta Merlin Lt. II*, Jl. Gajah Mada 3-5; *T.B. Ichtar*, Jl. Majapahit 6; *PT Kalman Media Pusaka*, Pusat Perdagangan Proyek Senen Blok I Lt. IV; *PT Merdeka Sarana Usaha*, Jl. P. Diponegoro 61; *PT Sastra Hidayat*, Jl. Proklamasi 61; *Drugstore Hotel Sari Pasifik*, Jl. M.H. Thamrin; *T.B. Tropen*, Jl. Pasar Baru 113.
- JAKARTA BARAT:** *T.B. Ciptaning*, Tomang Plaza, Jl. Kyai Tapa; *Istana Buku*, Jl. Kedoya Raya 27 C.
- JAKARTA TIMUR:** *T.B. Angkasa*, Jl. Angkasa 1 C; *T.B. Bakti*, Komplek IKIP Rawamangun; *Bursa Buku FISIP-UI*, Jl. Pemuda, Rawamangun; *Hilman Book Shop*, Komplek Pertokoan Pondok Bambu Jl. Pahlawan Revolusi 3; *NV. Indoprom Co. (Ind)*, Jl. Cililitan Besar Ujung; *T.B. Jaya*, Pasar Sunan Giri Lt. 1 Rawamangun; *T.B. Waringin*, Jl. Jatiwaringin Pondok Cede.
- JAKARTA SELATAN:** *T.B. Adinda*, Jl. R.S. Fatmawati Kav. 77 A Cipete; *T.B. Bahagia*, Jl. Cisanggiri I Los A II No. 13-17 Pasar Santa; *Bursa Buku IIK*, Jl. Purnawarman 99; *T.B. Darlia*, Jl. Pasar Minggu 8; *T.B. Gramedia*, Jl. Melawai IV/13 Blok M; *NV Indoprom*, PT Iswandi Lestari Gedung Arthaloka, Lt. Dasar Jl. Jend. Sudirman 2; *T.B. Kita*, Komplek Pertokoan Pondok Indah; *Newsstand Gunung Agung*, Hotel Kartika Plaza Jl. Jend. Sudirman; *Newsstand Sahid Jaya*, Jl. Jend. Sudirman; *Scientific Book Centre*, Jl. Melawai IV-165, B 7 Blok M; *T.B. Universitas Nasional*, Jl. Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu.
- BANDUNG:** *T.B. Gramedia*, Jl. Merdeka 43; *T.B. Alumni*, Jl. Ir. H. Juanda 54; *T.B. Mawar*, Jl. Braga 64; *Sanggar Buku Bandung*, Jl. Ir. H. Juanda 52.
- TASIKMALAYA:** *T.B. Widyagraha*, Jl. Bojongkaum 61-63 Tasikmalaya.
- PURWOKERTO:** *Yayasan Al-Amin*, Jl. Paisraja 20.
- SEMARANG:** *T.B. Merbabu*, Jl. Pandanaran 108-110; *T.B. Gramedia*, Jl. Pandanaran 116; *T.B. Surya*, Jl. M.T. Haryono 289; *Mickey Morse*, Jl. Depok 51.
- MAGELANG:** *T.B. Santosa*, Jl. Pemuda 3.
- YOGYAKARTA:** *T.B. Sari Ilmu*, Jl. Malioboro 119-121; *T.B. Indira*, Jl. Jend. Sudirman 62; *T.B. Gramedia*, Jl. Jend. Sudirman 54-56; *T.B. Campuciana*, Jl. Panjaitan km 1,5 (Depan Pondok Lepyak); *TPK Gunung Mulia*, Jl. Jend. Sudirman 69; *T.B. Tamansiswa*, Jl. Taman Siswa 6; *T.B. Indah*, Shopping Centre R 2-3; *T.B. BA-UN*, Shopping Centre A. 7-8; *Kopma UGM*, Ge'anggan Mhs. Pintu Barat Bulaksumur; *Kedaulatan Rakyat*, Jl. P. Mangkubumi 42.
- SURAKARTA:** *T.B. Budhilaksana*, Jl. P. Diponegoro 16; *T.B. Pikiran Rakyat*, Jl. Slamet Riyadi 222 C; *T.B. Lima Sekawan*, Jl. Slamet Riyadi 166.
- SURABAYA:** *T.B. Karya Anda*, Jl. *Praban* 55; *T.B. Sari Agung*, Jl. Tunjungan 5; *T.B. Indira*, Jl. Tunjungan 71; *T.B. Gramedia*, Jl. Basuki Rachmat 95; *Koperasi Mhs. Univ. Surabaya*, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169.
- MALANG:** *T.B. Gramedia*, Jl. Basuki Rachmat 3; *Kopma Unibraw*, Jl. M.T. Haryono 161 B.
- KEDIRI:** *T.B. Budaya*, Jl. Dhoho 61.
- MEDAN:** *T.B. Deli*, Jl. A. Yani 48.
- TANJUNGPURBAN:** *T.B. Fajar Agung*, Jl. Kartini 45; *T.B. Alumni*, Jl. Kartini 22 B.
- PADANG:** *T.B. Pustaka Angrek*, Jl. Pasar Raya 15; *T.B. Deli*, Jl. A. Yani 48; *L.M. Sinaga Agency*, Jl. Krakatau Komplek Perumahan DPRD TK I Sumut 11.
- MANADO:** *CV Sanggalangi*, Jl. Tikala Baru 5; *T.B. President*, Komplek Pusat Pertokoan Lt. III